



APPD PROGRAM “MENCETAK 100 RIBU MILLENNIAL ENTREPRENEUR DAN WOMEN ENTREPRENEUR SERTA PELAKU EKONOMI KREATIF”

LAPORAN KEGIATAN ANALISIS DATA



APRIL 5, 2022

NAMA: WILDAN VANNY HASHONA

NIP: 19911201 201210 1 001

DAFTAR ISI

BAB I.....	2
DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN.....	2
A. Gambaran Umum Topik Pengawasan.....	2
B. Identitas Obyek Pengawasan.....	3
C. Matrik Desain Pengawasan.....	3
BAB II.....	4
KEGIATAN ANALISIS DATA.....	4
A. Kegiatan Analisis Data.....	4
B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya.....	7
BAB III.....	8
PENUTUP.....	8

BAB I

DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN

Provinsi Sumatera Barat mempunyai tanah yang subur, alam yang indah serta kemampuan masyarakat untuk berdagang, ketiga hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2021 terdapat 3 Misi dari 7 Misi yang terkait dengan potensi daerah tersebut. Misi tersebut adalah Misi 3 (Pertanian, Perkebunan dan Perikanan), Misi 4 (Perdagangan dan Industri Kecil serta ekonomi digital) dan Misi 5 (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Untuk itu Sektor Pertanian (Agrikultur), Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta ekonomi berbasis digital dan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat.

Salah satu Program Unggulan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah “**Mencetak 100 Ribu Millenial Entrepreneur dan Women Entrepreneur Serta Pelaku Ekonomi Kreatif**”. Memfasilitasi tumbuhnya 100 ribu milenial entrepreneur dan woman entrepreneur direncanakan akan dilaksanakan dalam 5 tahun dengan proporsi 20 ribu setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2026 dan tersebar pada beberapa sektor, baik pertanian, peternakan, perikanan, industri, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sektor potensial lainnya.

Program unggulan ini mendukung Prioritas Nasional (PN 1) yaitu :

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”,

sasaran

”Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan Indikator Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi”

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dan APIP di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat melakukan kolaborasi dan sinergi pengawasan dalam bentuk Evaluasi atas program unggulan mencetak 100 ribu milenial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif, agar program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat memberikan saran/masukan strategis bagi pengambilan kebijakan, Target kegiatan yang cukup tinggi dan banyaknya sektor yang terlibat maka membutuhkan koordinasi yang cukup intens, dengan demikian risiko kegagalan untuk mencapai target harus diantisipasi, beberapa risiko tersebut antara lain kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri (silo), kurangnya komitmen para pihak dan ego sektoral serta isu konservasi dan perlindungan alam serta budaya lokal.

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan

Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan kualitas kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan penguatan UMKM memiliki cakupan program yang tersebar di berbagai sektor. Strategi ini akan sangat bergantung pada koordinasi lintas sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta *stakeholders* lainnya.

Pengawasan BPKP atas program ini diperlukan untuk memastikan efektivitas koordinasi lintas sektoral tersebut dan melihat secara keseluruhan akuntabilitas program melalui informasi hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Analisis kebijakan dan strategi Program “Mencetak 100 Ribu Millennial Entrepreneur dan Women Entrepreneur Serta Pelaku Ekonomi Kreatif”.
- 2) Akuntabilitas keuangan dan capaian program “Mencetak 100 Ribu Millennial Entrepreneur dan Women Entrepreneur Serta Pelaku Ekonomi Kreatif”.
- 3) Analisis peningkatan kualitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan jumlah UMKM, peningkatan produktivitas UMKM, serta kontribusi sektor UMKM dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian regional (PDRB).
- 4) Identifikasi hambatan dan permasalahan.
- 5) Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.

B. Identitas Obyek Pengawasan

Objek pengawasan adalah Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat, dengan definisi operasional program unggulan 100 ribu millennial yaitu memfasilitasi tumbuhnya 100 ribu millennial entrepreneur dan woman entrepreneur yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 5 tahun dengan proporsi 20 ribu setiap tahunnya dari tahun 2022 s/d 2026. Dimana, 100 ribu millennial tersebut tersebar pada beberapa sektor, baik dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sektor potensial lainnya.

Dari 7 (tujuh) sektor utama tersebut, terdapat 15 OPD yang mendukung probul ini sesuai dengan urusannya masing-masing, ditambah dengan Bappeda sebagai *leading sector* dan *supporting* dari Dinas Kominfo.

C. Matrik Desain Pengawasan

Berdasarkan jadwal pelaksanaan APPD ini, sampai dengan bulan April 2022 telah dilaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan, dengan output berupa Laporan Hasil Survei (draft) dan penentuan *Audit Question* (draft) yang akan menjadi dasar pengembangan Matrik Desain Pengawasan pada tahap penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2022.



BAB II

KEGIATAN ANALISIS DATA

Kegiatan Analisis Data yang dilakukan selama kegiatan Survei Pendahuluan

A. Kegiatan Analisis Data

Informasi Awal yang didapatkan dari data sekunder berasal dari data BPS Provinsi Sumatera Barat selama 5 Tahun terakhir diantaranya:

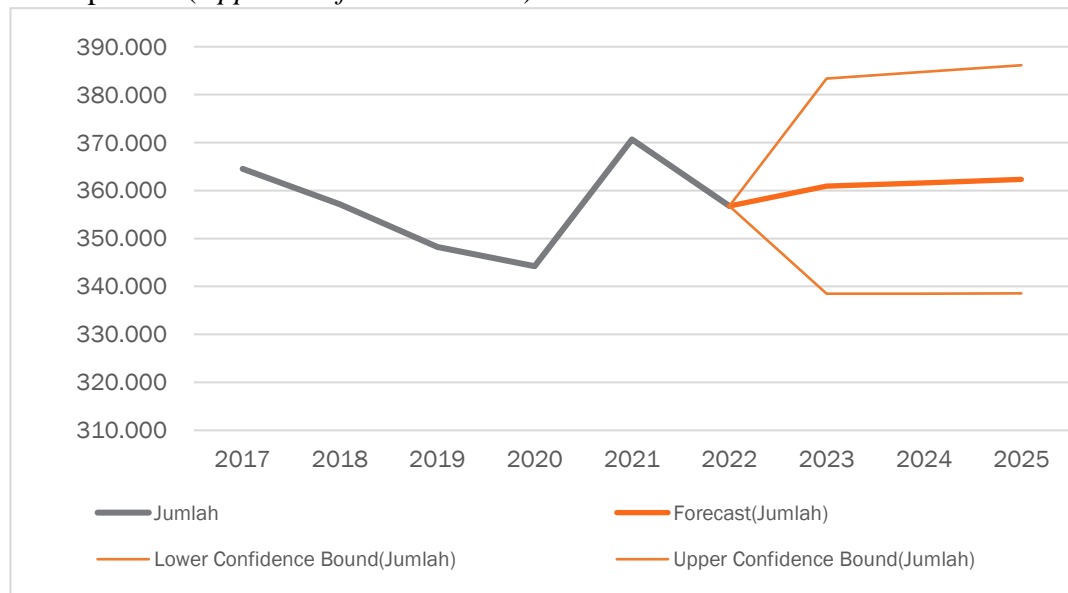
1. Forecasting Data

a. Tingkat Kemiskinan

meningkat dari 6,42% tahun 2019 menjadi 6,63 pada tahun 2021. Data selama 5 tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

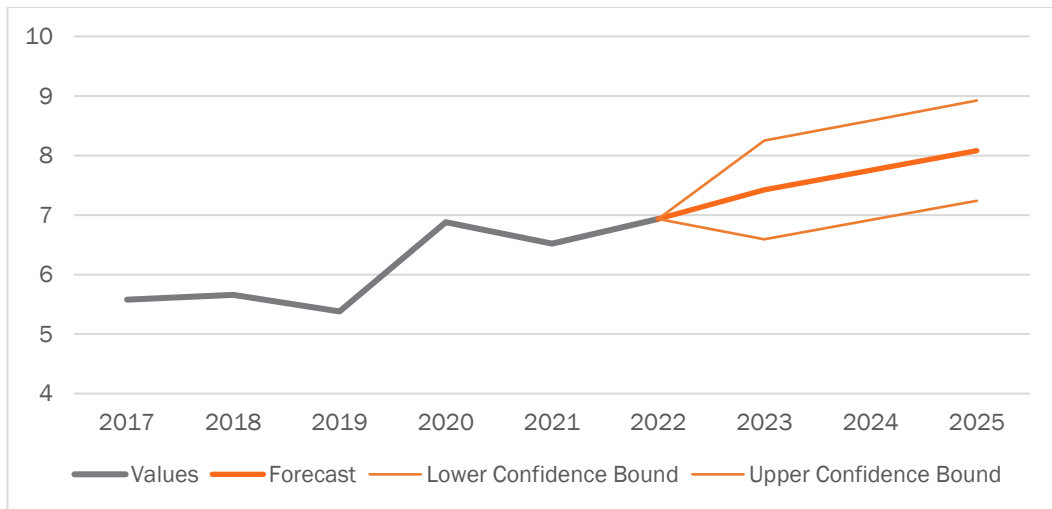
Tahun	Jumlah	%
2017	364.513	6,87
2018	357.130	6,65
2019	348.220	6,42
2020	344.230	6,28
2021	370.670	6,63
2022	356.777	6,32

Analisis menggunakan fungsi FORECAST.LINEAR (tingkat kepercayaan 95%, sampai dengan tahun 2025) didapatkan data bahwa prediksi pada tahun 2022 tingkat kemiskinan akan turun menjadi 6,63%. Namun dari forecasting ini juga menunjukkan pada 5 tahun kedepan tingkat kemiskinan diprediksi naik hingga mencapai 7% (*Upper Confidence Bound*) dalam kondisi normal.

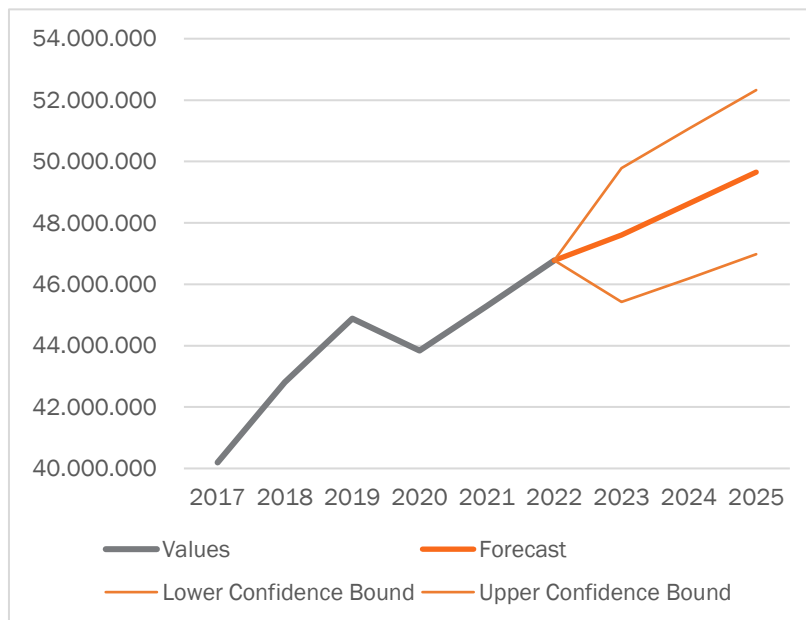


b. Tingkat pengangguran

meningkat dari 5,33 tahun 2019 menjadi 6,88 tahun 2020 dan diperkirakan terus melaju naik mencapai 6,93%



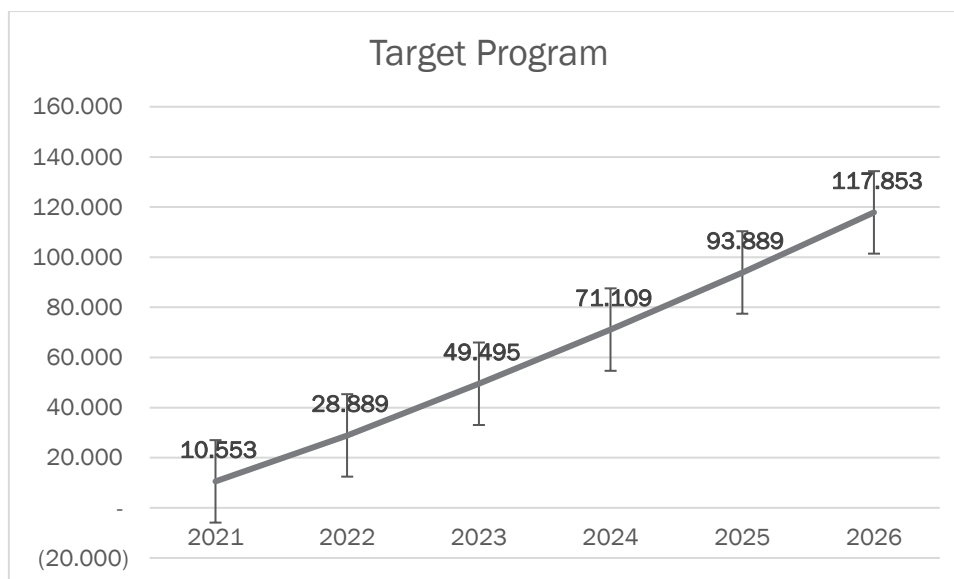
c. Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku



PDRB per kapita ADHB mengalami kemunduran dari 45,29 tahun 2019 turun ke 44,03 tahun 2020 namun mengalami rebound pada tahun 2021 dan diperkirakan akan terus naik.

2. Analisis Rasio

Dari Dokumen Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2002 Tanggal 22 Januari 2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 didapatkan data bahwa target riil dari program ini sebanyak 117.853 orang, dengan piloting pada tahun 2021 memiliki realisasi sebanyak 11.123 orang. Berdasarkan *data cleansing*, pada tahun 2021 terdapat peserta yang memiliki NIK ganda sehingga peserta sebenarnya hanya sebanyak 3.394 orang, dan target tahun 2022 sebanyak 18.336 orang.



Berdasarkan hasil wawancara pada rapat bersama 15 OPD terkait, didapatkan data bahwa kegiatan pada 14 OPD pelaksana dilakukan sesuai sektor/urusan wewenang masing-masing OPD, sehingga terdapat ketimpangan jenis, biaya, dan jumlah peserta di tiap OPD. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

SKPD/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022	TARGET 2022	Biaya/Orang
Dinas Pangan	2.974.557.283	112	26.558.547
Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan hortikultura	6.786.039.000	300	22.620.130
Dinas Sosial	8.028.659.398	412	19.487.037
Dinas Kelautan dan Perikanan	3.421.769.950	350	9.776.486
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.394.614.950	1.136	9.150.189
Dinas Pariwisata	9.938.709.000	1.850	5.372.275
Dinas Pemberdayaan Perempuan	2.553.290.000	675	3.782.652
Dinas Koperasi dan UMKM	4.316.964.000	1.500	2.877.976
Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	547.582.950	200	2.737.915
Dinas Pemuda dan Olahraga	1.200.000.000	470	2.553.191
Dinas Kebudayaan	497.032.100	200	2.485.161
Dinas Kehutanan	750.000.000	500	1.500.000
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.406.022.401	5.872	1.090.944
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.270.000.000	4.759	897.247

Dari data diatas dapat terdapat perbedaan yang sangat signifikan, Dinas Pangan dengan biaya tertinggi senilai 26.558.547/orang sedangkan Dinas Peternakan hanya 897.247/orang

B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

Berdasarkan hasil analisis data awal, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prediksi Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan PDRB per kapita harga berlaku tahun 2022 pada Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan salah satu impas dari pandemi COVID-19. Perlu diperhatikan penurunan ini dengan asumsi program entrepreneur tidak berjalan/tidak ada, sehingga dari hasil tahun 2022 akan dapat dilihat signifikansi program ini terhadap nilai riil Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan PDRB per kapita harga berlaku tahun 2022.
2. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat adanya ketimpangan dari subkegiatan-subkegiatan yang mendukung program ini, sehingga pengambilan sampel tidak dapat dilakukan menggunakan *Simple Random Sampling*. Penggunaan *Purposive Sampling* akan disarankan untuk dilakukan setidaknya pada 2 OPD dengan nilai ekstrim, yaitu Dinas Pangan dan Dinas Peternakan dan Keswan.

C. Proyek Jangka Panjang

Karena terbenturnya laporan ini dengan jadwal penugasan, maka belum dapat dilakukan analisis data pada tahap penyusunan pedoman dan evaluasi. Namun dapat diperoleh gambaran dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penyusunan matriks desain pengawasan dalam bentuk berikut:

1. Proyeksi kebutuhan dana, target dan realisasi target 5 tahun kedepan
2. Korelasi program terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan PDRB
3. Realisasi penyerapan dana dibandingkan dengan anggaran pada RPJMD
4. Realisasi jumlah peserta dengan target tahun bersangkutan.
5. Faktor-faktor eksternal lain yang mempengaruhi, misalnya tingkat pendidikan peserta, sektor yang paling berpengaruh

BAB III

PENUTUP

Masih banyak kekurangan dalam analisis data kegiatan APPD Probul Mencetak 100ribu Entrepreneur ini karena keterbatasan waktu dan jadwal pelaksanaan APPD ini.

Secara umum pada tahap survei, dapat diambil kesimpulan Program Unggulan ini diperlukan sebagai salah satu dukungan Program Penguatan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pengawasan terhadap program ini diperlukan karena memperhatikan nilai anggaran dan luasnya intrepertasi definisi operasional entrepreneur yang digunakan pada saat perencanaan.

Analisis Data akan dilanjutkan seiring berjalannya penugasan dan berkembangnya data yang diperoleh seiring dengan berjalannya program ini.